

# ISLAMISME DAN KONSTRUKSI GERAKAN POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DAN HIZB TAHRIR INDONESIA DI SULAWESI SELATAN

**Syahrir Karim**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar  
sahrirka@gmail.com

## **Abstract**

*In the scheme of organization, Prosperous Justice Party (PKS) and Hizb Tahrir Indonesia (HTI) are historically and ideologically bound in a solid emotional relationship. The two organizations are basically rooted in a transnational Islamic movement although in later development they ultimately develop their movements in different spheres; PKS focuses at the level of intra parliamentary with a formal political label whereas HTI concentrates at the level of extra parliamentary as a non-formal organizational movement. HTI, which openly refuses the system of democracy, as a matter of fact benefits significantly from democracy in Indonesia as a “political blessing.” HTI strongly criticizes the system of democracy in Indonesia and as a substitute proposes the system of Khilafah. Ironically, HTI gains freedom to perform its movement, to speak, and to campaign as Indonesia applies democracy.*

*Key words: Democracy, Islamic state, Islamic movement.*

## **Abstraksi**

*Secara organisatoris, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Hizb tahrir Indonesia (HTI) mempunyai hubungan emosional yang kental baik secara historis maupun ideologis. Keduanya sama-sama berbasis gerakan Islam transnasional meskipun pada akhirnya wilayah gerakan mereka berbeda, PKS pada level intra-parlementer yang berlabel partai politik formal sedangkan HTI pada wilayah ekstra-parlementer yang berlabel organisasi gerakan yang sifatnya non-formal. HTI yang menolak sistem demokrasi ternyata menikmati demokrasi di Indonesia sebagai “berkah politik”. HTI sangat keras mengkritik sistem demokrasi di Indonesia dengan mengusung konsep Khilafah, tetapi HTI bisa bebas bergerak, bebas berbicara dan bebas berkampanye karena Indonesia menganut sistem demokrasi.*

**Kata kunci:** Demokrasi, Negara Islam, dan Gerakan Islam

## Pendahuluan

Diskursus “Islamisme sebagai ancaman” sebagian besar merupakan “produk Intelektual” dari akademisi dari Barat. Pada saat yang sama beberapa kajian juga dari kalangan sarjana atau politisi dari negara-negara mayoritas muslim, terutama yang memiliki kerangka berfikir sekuler-liberal, ada yang menulis karya-karya akademik maupun non-akademik dengan cara pandang curiga terhadap Islamisme. Kebanyakan dari mereka biasanya lebih menonjolkan aspek-aspek Islamisme sebagai gerakan sektarian dan bersifat intoleran. Bagi mereka Islamisme adalah sebuah gerakan yang menyalahi konsep politik mederen. Islamisme sama halnya dengan kaum Fasisme yang telah menjadi musuh terhadap demokrasi dan kebebasan (Kundnani, 2008: 44-55). Mereka juga menitikberatkan kecenderungan gerakan Islamis yang menggunakan kekerasan yang menurut mereka gerakan ini harus ditolak. Serangan teroris di Amerika Serikat, sejak tragedi World Trade Center (WTC) tahun 2001, makin menguatkan diskursus Islamisme sebagai ancaman bersama.

Banyak kaum intelektual yang menulis Islamisme dengan nada negatif. Adapun yang menulis Indonesia secara spesifik adalah Zachary Abuza, Bilveer Singh, dan Sadanan Dhume, yang berargumen negatif atau dengan cara yang kurang simpatik. Bagi mereka, bahwa Islamisme jelas mengirim sinyal ancaman serius terhadap tradisi keragaman dan pluralitas bangsa. Dhume, misalnya terkenal dengan pernyataannya yang menggambarkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lebih berbahaya daripada jejaring teroris *Jamaah Islamiyah* (Muhtadi, 2012: xv). Selanjutnya sarjana yang menilai Islamisme pada dasarnya bersifat anti-demokrasi menyatakan bahwa kaum Islamis, di dalam dirinya memiliki pandangan yang bersifat teokratik. Oleh karena itu, kaum Islamis cenderung melihat demokrasi sebagai cara untuk mencapai tujuan terbentuknya negara Islam, demokrasi bukanlah tujuan itu sendiri (Muhtadi, 2012: xvi).

Lebih lanjut, bahwa terma “Islamisme” tidaklah cukup untuk

menilai sebuah bentuk gerakan, kecuali dengan karakter khusus sebagai berikut. *Pertama*, para pendukungnya percaya bahwa Islam harus diimplementasikan secara tekstual sebagaimana diperintahkan al-Quran dan Hadits, tanpa kompromi. Mereka percaya bahwa Islam satu-satunya solusi bagi krisis yang melanda umat Islam, karena Islam dipercaya sebagai agama yang lengkap, yang dapat diaplikasikan di setiap zaman dan tempat (*salih likulli zaman wa makan*). *Kedua*, mereka cenderung bersikap reaktif terhadap apapun yang mereka anggap sebagai bentuk penyelewengan Islam dan berusaha mengembalikannya kepada Islam versi mereka sendiri (Hilmy, 2009: 11-23). Bagi kaum Islamis, Barat dinilai gagal mensejahterakan tatanan sosial-politik penduduk dunia. Pada akhirnya kaum Islamis selalu mengatakan bahwa “syariah Islam adalah solusi” atas berbagai masalah sosial-politik dunia selama ini. Dalam masyarakat baru sekalipun yang hidup di sekitar lingkungan Islam akan menyukai pengetahuan Islam karena Islam akan tetap memberikan jalan keluar (Ghalioun, 2010: 126).

Kedua karakter di atas dapat diidentifikasi dalam konstruksi gerakan HTI dan PKS. Hizbu Tahrir Indonesia (HTI) misalnya, meskipun secara nyata menolak demokrasi akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa HTI hidup dalam sistem demokrasi di Indonesia. Upaya adaptasi dan pragmatis-realistik melihat realitas politik yang ada tetap menjadi fokus utama dalam membiarkan komitmen HTI dalam visi politiknya.

PKS dan HTI telah menjadi penelitian menarik oleh banyak pengkaji gerakan politik bukan hanya karena punya garis historis yang sama dari *Ikhwanul Muslimin*, akan tetapi juga karena sama-sama baru tampil secara terang-terangan setelah reformasi di Indonesia. Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana pola kerja ideologi (Islamisme) dan bentuk gerakan politik PKS dan HTI di Sulawesi Selatan serta implikasinya terhadap politik lokal. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang utama adalah sejumlah wawancara mendalam kepada beberapa informan-in-

forman kunci (*key Informan*). Sedangkan data sekunder diperoleh dari media umum, hasil-hasil studi para sarjana yang telah diterbitkan, dalam berbagai media massa, jurnal-jurnal, buku-buku, dan hasil penelitian lainnya yang sesuai dengan bahan kajian dalam studi ini. Penelitian ini menggunakan kerangka teori gerakan social (*social movements theory*). Terdapat tiga konsep teori gerakan sosial yang sangat penting yaitu struktur peluang politik (*political opportunity structure*), pembingkaiian (*framing*), dan struktur mobilisasi (*mobilizing structure*) (Noorhaidi Hasan, 2012: 131). Dengan menggunakan tiga perspektif gerakan sosial tersebut sebagai pisau analisa, maka PKS-HTI dapat dilihat bagaimana pola aktivisme yang lebih terorganisir secara rapi yang memiliki komitmen jangka panjang atau cita-cita perjuangan politik mereka.

## Islamisme di Sulawesi Selatan

Dalam konteks Sulawesi Selatan, Islam menjadi agama mayoritas dalam kehidupan masyarakat. Hingga saat ini masyarakat Sulawesi Selatan sering diidentikkan dengan Islam, bahkan jika Aceh dikenal dengan serambi Mekkah, maka orang-orang Sulawesi Selatan mengidentikkan daerahnya sebagai Serambi Madinah. Sebagai daerah yang mayoritas penduduknya adalah Islam ditambah lagi dengan akar Islamisasi yang telah ada sejak zaman kerajaan dahulu, maka sangat wajar kalau pola-pola Islamisme selalu ada dan berpengaruh dalam politik lokal.

Pola Islamisme di Sulawesi Selatan sendiri secara garis besar terdapat setidaknya dua pola, yaitu pola Islamisme yang ada di dalam institusi negara (struktural kekuasaan negara) dan pola Islamisme yang ada di luar institusi negara. Pola Islamisme yang ada di dalam institusi negara (struktural negara), *pertama*, pola para Datuk yang sukses mengislamkan raja-raja di Sulawesi Selatan (Nashir, 2007: 292);<sup>1</sup> *kedua*, pola Partai-partai

1 Pola pertama adalah ketika awal penyebaran Islam pertama yang datang ke Luwu dibawa oleh tiga pendakwah dari Minangkabau yang berlayar dari Johor yang dikenal dengan 3 (Tiga) Datuk, yaitu Sulaiman (Khatib Sulaiman Datuk Patimang), Abdul Makmur (Abdul Makmur Khatib Tunggal Datuk ri Bandang), dan Chatib Bungsu (Khatib Bungsu Datuk ri

Islam yang telah ada sejak orde lama sampai sekarang seperti Syarikat Islam (SI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Sedangkan Pola Islamisme yang ada di luar institusi formal negara, yaitu *pertama*, yakni pola Kahar Muzakkar yang melakukan pemberontakan/perlawanan kepada pemerintah yang bertujuan mendirikan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII); *kedua*, pola Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) yang sebahagian dapat dipandang sukses dengan menggunakan pendekatan struktural politik. *Ketiga*, pola Hizbu Tahrir Indonesia (HTI) yang konsisten dengan perjuangan khilafahnya, serta gerakan-gerakan Islam yang lain yang mengusung perjuangan pemurnian Islam sesuai pandangan Islamisme masing-masing.

Di dalam pola-pola Islamisme di atas, ada varian-varian Islamisme yang tidak tunggal, Islamisme berwajah sangat jamak yang tentu memerlukan kajian yang serius untuk menunjukkan varian-varian tersebut dengan melihat pola gerakannya. Selain itu, bisa dilihat dalam pendekatan struktural (kekuasaan) dengan melihat kebijakan politik pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten terkait cita-cita ideologi-politik Islam yang mengusung formalisasi syari'at Islam dalam institusi pemerintahan di Sulawesi Selatan.

Formalisasi syariah dan perjuangan negara Islam adalah bukan suatu hal yang baru dalam masyarakat Sulawesi selatan. Kahar Muzakkar adalah tokoh yang dianggap sebagai orang yang "berjihad" memberlakukan kembali syariat Islam sebagai wujud penolakan atas pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta dan terhadap pengaruh komunis di Sulawesi Selatan pada awal tahun 1951-an yang terkenal dengan gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Selanjutnya adalah perjuangan atau gerakan penegakan syariat Islam Komite Penegakan

---

Tiro). Islam masuk ke Luwu melalui dialog yang panjang antara ketiga pendakwah itu dengan penguasa Luwu iaitu Datuk La Patiware (memerintah pada tahun 1585-1610), yang akhirnya memeluk Islam pada 15 Ramadhan 1013 Hijriyah atau 5 Februari 1603, dua tahun sebelum Islam masuk ke Gowa. Selanjutnya atas saran Datuk Patiware ketiga penyebar Islam itu pergi ke Gowa dan Bulukumba, yang akhirnya dapat menyebarkan Islam secara lebih leluasa di dua daerah itu..

dan Penerapan Syariat Islam (KPPSI).

Kehadiran gerakan-gerakan Islam ideologis seperti yang diperlihatkan oleh HTI, dan kelompok-kelompok penegak formalisasi syariat Islam di Sulawesi Selatan tentu memunculkan tanda tanya kepada publik terkait yang mendasari kemunculan dasar gerakan mereka. Pertanyaan-pertanyaan mendasar di atas mencuat ke permukaan ketika fenomena Islamisme di Sulawesi Selatan pasca reformasi semakin memperlihatkan eksistensinya. Setidaknya terdapat beberapa kelompok yang muncul baik dari dalam maupun di luar institusi formal negara yang semakin memperlihatkan aktivismenya. Perjuangan oleh kelompok-kelompok Islamis tersebut tentu akan sangat berpengaruh ke dalam politik dan proses demokratisasi pada level lokal.

### **Gerakan Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyadari bahwa untuk mencapai kejayaan masa depan seperti yang dicita-citakan gerakan Islam, perlu disusun kerangka gerak integral, bertahap dan berterusan. Secara teoritis, kerangka gerak yang dimaksud melalui empat kegiatan atau orbit (*mihwar*) gerakan yaitu; 1) *miwar tanzhimi* (fase ideologisasi), 2) *mihwar sya'bi* (sosialisasi gerakan), 3) *mihwar mu'assasi* (kelembagaan politik), 4) *mihwar dawlah* (kelembagaan Negara) (Takariawan, 2009: 46). Dalam masing-masing orbit semua saling berhubungan antara satu dengan yang lain secara sinergis, dan berjalan secara sistematis dari awal sampai akhir. Misalnya, sebuah gerakan dakwah yang telah mencapai orbit kenegaraan (*mihwar dawlah*) berarti mereka tengah melakukan keempatnya secara bersamaan pada saat yang sama.

Pertama; *Mihwar Tanzhimi*. Tahapan ini fokus pada pembentukan kekuatan internal kader dengan menanamkan ideologi organisasi. Dalam kasus di Sulawesi Selatan, PKS melakukan perekrutan kader di kalangan aktivis muda di kampus-kampus. Mereka membentuk organisasi yang menghimpun

segenap potensi mahasiswa. Menurut Tamsil Linrung (2014: 7) tanpa menyiapkan aktor sebagai operator aksioma, ideologi se-canggih apapun akan lumpuh. Hanya menjadi hiasan dialektik. Tantangan terberat bagi partai politik sebagai pilar demokrasi adalah menyiapkan kader-kader dengan basis ideologi yang mengakar. Mereka hanya boleh dikader dalam sistem-sistem kaderisasi yang ketat. Di sinilah salah satu titik krusial demokrasi ditentukan. Salah satu caranya adalah mengembangkan kader di kampus-kampus. Di beberapa kampus yang terdeteksi organisasi yang menjadi embrio PKS adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan lain-lain yang sering dikenal sebagai *jama'ah tarbiyah*. Hampir semua kampus baik negeri maupun swasta Sulawesi Selatan mempunyai organisasi ini.

Kedua, *Mihwar Sya'bi*. Tahapan ini fokus pada sosialisasi gerakan dakwah. Setelah sebelumnya pada tahap pertama mereka merasa konsolidasi internal sudah matang. Sasaran tahap kedua ini adalah *pertama*, meningkatkan kapasitas keberagamaan masyarakat; *kedua*, memunculkan dan menguatkan opini-opini positif tentang Islam dalam bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, hukum, hankam, maupun HAM; *ketiga*, membuat wadah kegiatan yang legal dan formal. Hal ini boleh dilihat dari terbentuknya Bulan Sabit Merah (BSM) yang bergerak di bidang kemanusiaan.; *keempat*, membuat wadah-wadah atau lembaga yang menghimpun potensi masyarakat, seperti *Tali Foundation* yang bergerak di bidang bantuan modal usaha masyarakat yang berpusat di Makassar, dan seterusnya; *kelima*, membangun komunikasi dan silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi sosial politik serta lembaga-lembaga dakwah.<sup>2</sup>

Ketiga, *Mihwar Mu'assasi*. Pada tahapan ini partisipasi

2 Terbukti bahwa selama ini kader-kader PKS selalu berkoalisi dengan partai-partai lain dalam pencalonan kepala daerah. Di saat yang sama, sebahagian besar kader dan pengurus PKS Sulawesi Selatan adalah berasal dari organisasi-organisasi Islam, seperti NU, Muhammadiyah dan Wahdah Islamiah. Bahkan terbaru ketika Wahdah Islamiah melakukan Muktamar di Makassar, presiden PKS Anis Matta turut hadir dalam acara tersebut, yang menimbulkan opini publik bahwa wahdah Islamiah mendukung Anis Matta maju sebagai calon Presiden.

politik secara langsung harus dilakukan. Tahapan ini bisa terwujud dengan terbentuknya partai politik dari gerakan dakwah, atau tersebarinya aktivis gerakan dakwah dalam berbagai partai politik. Terbukti bahwa sebagian besar kader KAMMI dan LDK bertebaran di beberapa partai politik di Sulawesi Selatan. Masukkan aktivis dakwah dalam lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di Sulawesi Selatan kader murni PKS telah tersebar dalam lembaga-lembaga tersebut. Selanjutnya bisa dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.

**Jumlah Perolehan Pemilih Sah Partai Politik dalam Pemilu DPRD Provinsi**

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Nasional Demokrat	719,615
2	Partai Kebangkitan Bangsa	492,224
3	Partai Keadilan Sejahtera	624,756
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	604,248
5	GOLKAR	2,043,550
6	GERINDRA	1,022,449
7	DEMOKRAT	1,061,846
8	Partai Amanat Nasional	830,125
9	Partai Persatuan Pembangunan	634,697
10	HANURA	567,441
11	Partai Bulan Bintang	255,133
12	Partai Keadilan dan Persatuan Pembangunan	231,051

*Sumber: Diolah KPU Sulawesi Selatan*

Dengan status partai Islam yang masih muda dibandingkan dengan partai Islam lainnya seperti PPP, ternyata dari data di atas menunjukkan bahwa mesin partai yang termasuk militan masih berjalan efektif. Bahkan partai seperti PKB dan PAN yang mempunyai basis massa yang besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, meskipun unggul dari perolehan pemilih dari PKS akan tetapi perbedaannya tidak signifikan.



Tabel 2.

**Jumlah Kursi Anggota Parlemen PKS di Sulawesi Selatan**

Wilayah	Jenis	Kota	Jumlah Kursi	
			2009	2014
Sul-Sel	Pusat	Jakarta	2	3
DPW	Provinsi	Sulawesi Selatan	7	7
DPC	Kota	Makassar	5	5
DPC	Kabupaten	Gowa	2	2
DPC	Kabupaten	Takalar	3	4
DPC	Kabupaten	Jeneponto	3	3
DPC	Kabupaten	Bantaeng	1	4
DPC	Kabupaten	Bulukumba	-	3
DPC	Kabupaten	Sinjai	3	3
DPC	Kabupaten	Selayar	-	3
DPC	Kabupaten	Maros	3	2
DPC	Kabupaten	Barru	2	3
DPC	Kabupaten	Pangkep	3	2
DPC	Kota	Pare-pare	3	2
DPC	Kabupaten	Soppeng	-	-
DPC	Kabupaten	Wajo	2	2
DPC	Kabupaten	Sidrap	4	4
DPC	Kabupaten	Enrekang	1	4
DPC	Kabupaten	Tator	2	-
DPC	Kabupaten	Palopo	-	1
DPC	Kota	Bone	3	5
DPC	Kabupaten	Luwu	1	1
DPC	Kabupaten	Luwu Timur	3	-
DPC	Kabupaten	Luwu Utara	3	-

Sumber: Diolah KPU Sulawesi Selatan

Tabel 2. menunjukkan bahwa jumlah kader PKS dalam parlemen sudah tersebar. Sehingga tahapan ketiga ini (mihwar mu'assasi) dianggap terealisasi. Hal ini memungkinkan PKS bisa bekerja secara maksimal dalam menjalankan visi dakwah politiknya. Selanjutnya dalam tahapan ini (mihwar mu'assasi) ini juga dilakukan komunikasi politik, baik dalam

bentuk koalisi dengan partai lain dan bentuk lainnya. Pada tahun 2014 ini PKS, baik pada tingkat pusat sampai ke daerah tetap konsisten dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Koalisi ini akan dijadikan sebagai sebuah grand strategy dalam perjuangan dakwah PKS.

Selanjutnya fase terakhir, *Mihwar Dawlah*. Logika tahapan ini adalah bahwa usaha untuk penegakan keadilan, kebajikan, dan penjagaan terhadap aspirasi umat tidak cukup dilakukan atau diwakili oleh partai politik saja. Bagi PKS, ada banyak keterbatasan partai politik. Partai hanya menjadi salah satu instrument yang kegiatannya dipengaruhi oleh berbagai sistem lain dalam sebuah negara. Misalnya saja, kehidupan partai politik dipengaruhi oleh undang-undang dan perangkat peraturan lain berkaitan dengan kepartaian dan pemilu. Kalaupun lewat partai politik bisa mengirimkan aktivis dakwah untuk mengemban misi ke gedung parlemen, hal itu belum mencakup keperluan untuk mencapai sasaran-sasaran politik yang lebih luas (Takariawan, 2009: 100). Menurut Sri Rahmi (2015) dalam konteks Sulawesi Selatan, dengan hadirnya beberapa kader-kader PKS dalam parlemen, serta jabatan Wakil Bupati di beberapa daerah membuktikan bahwa di Sulawesi Selatan khususnya sudah masuk tahapan *Mihwar daulah*. Hal ini tentu memerlukan keterlibatan para aktivis dakwah (PKS) sehingga harus diaplikasikan dalam orbit penetrasi ke dalam kelembagaan negara. Penetrasi politik ke dalam negara adalah sebuah fenomena tersendiri dalam politik Islam saat ini. Berikut bentuk perjuangan PKS dalam mengusung calon Bupati dan wakil Bupati:

Tabel 3.

**Koalisi PKS dengan Partai Lain Menjadi  
Gubernur/Bupati/Wakil Bupati**

Provinsi/Kota	Nama Pasangan Calon	Partai Koalisi
Sulawesi Selatan	Ilham Arief Sirajuddin Abd. Aziz Kahhar Muzakkar	PKS, PD, HANURA

<b>Provinsi/Kota</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Partai Koalisi</b>
Gowa	Andi Maddusila Andi Idjo Jamaluddin Rustam	<b>PKS</b> , PKB, PBB, PKPI, PPIB, PKPB, PDP, PIS, PSI PDS
Selayar	H. Syahrir Wahab, MM H. Saiful Arif, SH	Golkar, PAN, PKB, PPP, Barnas, Gerindra dan <b>PKS</b>
Bulukumba	H. Zainuddin Hasan H. Syamsuddin, SH., MH	PKB, PKNU, PMB, Gerindra, Merdeka, <b>PKS</b> , PKP
Maros	Nur Hasan - Karim Saleh	PKB, PKNU, PMB, Gerindra, merdeka, <b>PKS</b> , PKP
Pangkep	Drs. H.M. Taufik Fachruddin Hj. Nurul Jaman Syafruddin Nur, SH	<b>PKS</b> , PDIP, PDK, PBR
Barru	HM Malkan Amin HM Sofyan Lskki SH MSi	Partai Demokrat, <b>PKS</b> PPP, PBR, dan PDK
Soppeng	H. Andi Soetomo Aris Muhammadiyah	<b>PKS</b> , PAN, PKNU, PPRN, PDP, dan PKPI.
Tator	HM.Yunus Kadir Dr.Ir.Yansen Tangketasik,M.Si	<b>PKS</b> , PAN, HANURA, PPDI
Bone	Drs. H. Andi Fashar Mahdin Padjalangi, M.Si-Ambo Dalle	Golkar, PDIP, PPP, <b>PKS</b>
Luwu Timur	Andi Hatta Marakarma Thorig Husler	Golkar, <b>PKS</b> , Demokrat, PAN,
Luwu Utara	Drs. Arifin Junaidi, MM Indah Putri Indriany	<b>PKS</b> , Golkar, PBB, PPP, PAN
Luwu	A. Muzakkar Amru Saher, ST	<b>PKS</b> , Golkar, PBB, PAN

Sumber: Diolah KPU Sulawesi Selatan

Tabel 3. menunjukkan bahwa sebaran koalisi PKS sangat merata pada hampir semua partai. Hal ini menunjukkan bah-

wa komunikasi politik PKS ke partai lainnya sangat merata dan tidak memilih-milih partai tertentu. Koalisi ini juga selalu bersatu dalam membuat peraturan daerah. Menurut analisis penulis, bahwa fenomena ini menandakan kalau identitas dan ideologi partai tidak menjadi halangan bagi PKS. Hal ini juga menandakan bahwa untuk menuju tahap keempat yakni *mihwar daulah*, PKS tidak boleh tertutup oleh partai lain, PKS harus terbuka untuk mencapai visi politik Islamisnya. Bahkan dalam pemilihan presiden 2014 lalu, PKS solid berkoalisi dengan partai lain yang dinamakan koalisi merah putih (KMP).

Data di atas juga menunjukkan bahwa keseriusan PKS dalam memperjuangkan visi partainya sangat tinggi. Meskipun masih dalam bentuk koalisi dengan partai lainnya, akan tetapi sebagai partai baru, itu dianggap cukup signifikan gerakannya. Bahkan khusus untuk Kabupaten Luwu, kader PKS menempatkan kadernya sendiri yaitu Amru Saher, ST. untuk ikut dalam pemilihan bupati dan wakil bupati. Amru Saher pun mampu menang bersama A. Muzakkar dalam pemilihan tersebut. Hal ini adalah prestasi yang sangat bagus demi perjuangan PKS sebagai partai dakwah, sekaligus menjadi langkah mulus menuju *mihwar dawlāh*. Ini semakin menegaskan bahwa gerakan Islamis telah sadar, bahwa untuk memperjuangkan visi politik Islamismenya mereka harus masuk dalam lingkaran kekuasaan/politik. Dakwah Islam harus bersinergi dengan politik.

Fenomena tersebut juga terlihat pada pemilihan calon walikota dan wakil walikota Makassar 2013, setidaknya itu tergambar dalam program utama yang dipaparkan dalam kampanye oleh pasangan calon Partai Keadilan sejahtera (PKS); 1) *Quick Response*; 2) Layanan satu atap; 3) Transparansi; 4) Walikota mendengar; 5) Makassar *Cyber Net*; 6) Optimalisasi aparatur pemerintah.

Dari tujuh program utama di atas jelas menggambarkan bahwa pasangan PKS dalam pemilu Walikota Makassar cukup memberikan gambaran terkait konsep pemerintahan yang baik (*good governance*). Arah kebijakan dan kampanye PKS terlihat tidak ada bedanya dengan partai-partai lainnya. Isu-isu ideolo-

gis seperti penegakan syariat Islam tidak lagi menjadi isu utama. Bahkan dalam kasus tertentu, PKS membuat banyak orang terkejut terkait pengesahan undang-undang minuman keras di kota Makassar, di mana PKS termasuk partai yang ikut menyetujui peraturan daerah tersebut.

Melihat praktik politik dan isu-isu di atas, sebenarnya PKS sangat menginginkan adanya pemahaman kepada masyarakat bahwa partai ini tidak inklusif, sangat terbuka terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat. Ini menjadi catatan tersendiri bahwa untuk masuk ke tahapan *mihwar daulah* tentunya harus mampu menangkap isu-isu yang tampak jelas terjadi dalam masyarakat untuk diperjuangkan dalam negara. Walau tidak bisa disangkal, bahwa dalam banyak kasus, PKS sering terjebak pada kepentingan praktis dan dilema antara pemilih dan syariah. Antara kehendak *jama'ah* dan kepentingan praktis politik. Ini adalah sebuah resiko yang mesti diambil oleh PKS dengan spirit partai dakwah yang hidup dalam sistem sekularistik demokrasi langsung.

Melihat keberadaan PKS dalam konteks demokrasi dengan fenomena aksi politik di atas memang sangat menarik. Maka tidak jarang banyak pengamat politik sering mengidentifikasi PKS dengan sebutan kaum *Islamist democrat* (Demokrat Islamis), yakni kelompok Islam yang menjalankan demokrasi, setidaknya demokrasi elektoral, tetapi tetap mempertahankan identitas dan agenda-agenda Islam ke dalam kehidupan publik. Istilah *Islamist democrat* ini menurut Saiful Mujani (2008:78), adalah suatu *contradictio interminis*, atau ungkapan yang mengandung pengertian kontradiktif di dalam dirinya.

Tentu mudah difahami mengapa fenomena *Islamist democrat* disebut sebagai sebuah kontradiksi, karena disadari bahwa selama ini *pattern* yang terbentuk antara *gerakan Islam* dan *demokrasi* adalah dua hal berbeda yang tidak pernah bisa bertemu. Hal ini bisa dilihat pandangan-pandangan tersebut melalui pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir, Jamaah Ansharut Tauhid, dan kelompok-kelompok anti demokrasi lainnya.

## Aktivisme Hizb Tahrir Indonesia (HTI)

Kemunculan HTI di Sulawesi Selatan tidak dapat dipisahkan dari peranan jaringan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) pada tahun 1990-an. Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan kota tujuan belajar bagi anak muda Indonesia Timur, karena kota ini menyediakan sejumlah universitas terkemuka seperti di antaranya: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Universitas Hasanuddin (UNHAS), Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Muslim Indonesia (UMI), dan Universitas-Universitas lainnya. Seperti diketahui, kampus menyediakan basis bagi gerakan Islam untuk berkembang melalui LDK. Di Makassar, kampus UMI dan UNM telah memiliki LDK pada tahun 1990-an sebagai bagian dari jaringan LDK se-Indonesia, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh aktivis mahasiswa Muslim di Jawa Barat. Namun demikian, pada fase awal perkembangannya, LDK merupakan organisasi longgar (*loose organization*) yang mengakomodasi mahasiswa dari berbagai aliran organisasi Islam. Para aktivis LDK UMI-lah yang berperan penting dalam membawa ide-ide HTI dan mengembangkannya di Makassar. Ini adalah hasil interaksi intensif antara aktivis LDK UMI dan aktivis LDK di Jawa (Rizal, 2011: 20).

Selanjutnya, peluncuran cabang HTI Makassar dirangkaikan dengan sebuah seminar mengenai khilafah yang diselenggarakan di kampus UNHAS pada tahun 2000. Kegiatan ini mengikuti kemunculan HTI di Jakarta dengan kegiatan Konferensi Internasional tentang khilafah pada Mei 2000 di Stadion Senayan di Jakarta. Seminar HTI di Makassar tersebut dihadiri sekitar 1.000-an orang, termasuk mahasiswa dan berbagai segmen dari masyarakat. Pembicara-pembicara yang diundang antara lain: Prof. Dr. H. Abdurrahman Basalamah (Rektor UMI), Prof. Dr. Mattulada (sejarawan UNHAS), dan Dr. Utsman (Aktivis HTI dari Surabaya) (Rizal, 2011: 20). Sejak saat itu, HTI beroperasi aktif di tengah masyarakat dengan mengorganisir berbagai aktivitas untuk mendakwahkan ide-idenya dan menarik dukungan publik.

Sebagai bagian dari cabang wilayah HTI, Sulawesi Selatan mempunyai tingkat kepengurusan sebagai berikut: pengurus HTI di tingkat propinsi disebut dengan Dewan Pimpinan Daerah 1 (DPD 1), DPD II untuk tingkat kabupaten, dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk tingkat Kecamatan. Struktur pengurus HTI DPD I terdiri dari *Lajnah Tsaqafiyah* (Departemen Kebudayaan), *Lajnah Siyasiyyah* (Departemen Politik), *Lajnah Maslahiyah* (Departemen Kemaslahatan), *Lajnah Fa'liyyah* (Departemen Administrasi), dan *Lajnah Ilamiyyah* (Departemen Informasi) (Rizal, 2011: 20).

Dalam perkembangannya, ekspansi HTI di sejumlah daerah tidak bisa dilepaskan dari doktrin dan aktivitas dakwah dalam organisasi ini. Dalam kaitan ini, strategi rekrutmen HT sangat berkaitan erat dengan ideologi dan pandangannya tentang dakwah. Kebanyakan perekrutan HTI berlangsung di kampus-kampus. Sarana penting bagi rekrutmen adalah dengan mengadakan program pelatihan dan seminar dalam berbagai bentuk di kampus-kampus. Meskipun demikian, sebagian besar proses rekrutmen HTI berlangsung melalui hubungan interpersonal antara aktivis HTI dan calon anggota baik dalam bentuk *halaqah* dan lain-lain.

Di Sulawesi Selatan, salah satu kekuatan HT adalah terletak pada para aktivisnya yang militan serta jaringan (*network*) yang kuat sehingga dapat merancang berbagai macam kegiatan. Kegiatan HT kebanyakan di universitas dan masjid. Di beberapa universitas hampir memiliki cabang yang biasanya disebut *chapter*. Di universitas mayoritas afiliasi kumpulan mereka adalah kumpulan Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Menurut Didi (2015), fenomena HTI di Universitas tidak hanya melakukan kajian tetapi juga sudah mulai masuk dalam politik praktis di kampus, hal ini bisa dilihat ketika adanya pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). HTI dalam hal ini selalu turut serta dalam pemilihan tersebut dengan cara mengajukan kader-kadernya untuk ikut dalam pemilihan tersebut.

Selanjutnya dalam memperjuangkan cita-citanya, HTI

memiliki tiga tahapan dakwah dan aktifitas politiknya, yang kemudian menjadi gerakan utama dalam perjuangannya.

**Pertama**, *Tahap tatsqif* (pembinaan dan pengkaderan), adalah tahap pembentukan gerakan, di mana saat itu ditemukan benih gerakan dan terbentuk *halaqah pertama* setelah memahami konsep dan metode dakwah Hizbut Tahrir. *Halaqah* pertama ini kemudian menghubungi anggota-anggota masyarakat untuk menawarkan konsep dan metode dakwah Hizbut Tahrir, secara individual atau interpersonal. Menurut Zainuddin Losi (2015), di Sulawesi Selatan hampir semua kabupaten/kota mempunyai kepengurusan HTI. Bahkan menurut pengakuan beberapa *syabab* (ahli HTI) mengatakan bahwa HTI terstruktur kepengurusannya hingga pada tingkat desa.<sup>3</sup>

Dalam proses pembinaan dan pengkaderan ini, bahwa siapa saja yang menerima *fikrah (ideologi) Hizbut Tahrir* langsung diajak mengikuti pembinaan secara terus menerus dalam *halaqah-halaqah* Hizbut Tahrir, sampai mereka menyatu dengan ide-ide dan hukum-hukum Islam. Hal ini dimaksudkan agar mereka memiliki kepribadian Islam, mempunyai pola pikir dan pandangan Islam, serta tatkala memutuskan sesuatu selalu berlandaskan pada tolak ukur halal dan haram.

Bentuk dan jenis kegiatan lain yang menunjang upaya transformasi pemikiran (*al-sira' al-fikri*) HT adalah seperti kegiatan di lingkungan intelektual yang biasanya berbentuk seminar, sedangkan kegiatan di lingkungan masyarakat awam biasanya berbentuk tabligh akbar, bedah buku, atau kegiatan lain yang bersifat cair dan terbuka. Secara umum kegiatan-kegiatan HTI dapat dipilah sebagaimana berikut: diskusi publik, kajian rutin, pelatihan, forum silaturahmi, tabligh akbar dan *tour* dakwah. Berikut contoh sebagian tulisan HTI di Sulawesi Selatan yang telah di terbitkan.

---

3 Pernyataan ini sebenarnya masih menjadi tanda tanya, karena ketika peneliti memintai SK kepengurusan sampai pada tingkat desa mereka tidak bisa menjelaskan. Ini adalah sisi lain dimana HTI khususnya di Sulawesi Selatan masih tertutup terkait berapa jumlah anggotanya.



Tabel 4.

**Kumpulan Artikel, Buku, dan Tema-Tema Seminar Aktivistis HT  
di Sulawesi Selatan Sebagai Bentuk *al-sira' al-fikri***

No.	Penulis/ Penyelenggara	Judul	Waktu
1.	Taufiq	Meneropong Masa Depan Islam	14 Januari 2013
2.	Fieman Menne	Memahami Ide Khilafah	20 Pebruari 2014
3.	Armand Kamaruddin	Khilafah Islamiyah untuk Semua	1 April 2014
4.	Kasriyani K	Mengapa Miss World Dipersoalkan?	5 April 2013
5.	Abd. Haris Amrin	Meningkatkan Kasusa-daran Ummat	23 Maret 2014
6.	Abd. Haris Amrin	Retorika Kemerdekaan dalam Perspektif Kapitalisme	15 Agustus 2013
7.	Bahrul Ulum Ilham	Pedasnya Balsem BBM	6 Juli 2013
8.	Abd. Haris	Jangan Amnesia Pasca-Ramadhan	10 Agustus 2013
9.	HTI Sul-Sel	Politik Global barat: Penjajahan	11 April 2011
10.	Yudnansah	Rapor Merah tahun 2013	5 Januari 2014
11.	Diskusi Publik	Ideologi Demokrasi (buku saku)	2002
12.	HTI Sul-Sel	Masa Depan Indonesia Pasca Pesta Demokrasi	27 April 2014
13.	Seminar	Peran sains dan Teknologi dalam membangun peradaban Islam	20 Juni 2014

Tabel 4. di atas menunjukkan aksi HTI dalam melakukan *al-sira'al-fikri*. Ini adalah sebuah cara (*uslub*) yang digunakan oleh masing-masing aktivis HTI di Sulawesi Selatan. Harian Koran *Fajar* dan Harian *Tribun Timur* sebagai koran lokal disebut sebagai *uslub* melakukan *al sira'al-fikri* dalam menyebarkan ide-ide HTI.

Selanjutnya, diskusi publik paling banyak diselenggarakan HTI. Nama dan bentuk forumnya bisa bermacam-macam: konferensi, seminar, dialog interaktif, diskusi muslimah, bedah buku dan lain-lain. Kajian rutin yang diselenggarakan HTI dimaksudkan untuk mengenalkan lebih jauh gagasan-gagasannya kepada mereka yang sudah mulai tertarik dengan organisasi ini. Tema yang dibahas biasanya sudah menjurus pada gagasan-gagasan inti HTI, misalnya “Selamatkan Indonesia dengan Khilafah”. Dialog rutin setiap akhir tahun dengan tema: Refleksi Tahun 2013 Rapor Merah Rezim Sekuler. Kegiatan ini mengundang banyak orang dan semua *chapter* HTI di setiap universitas di Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan ini.

Di Sulawesi Selatan dalam dua tahun terakhir ini telah mengadakan kegiatan yang sangat besar dengan jumlah massa ribuan orang, yaitu muktamar khilafah, Kongres mahasiswa Islam se-Sulawesi dan terakhir adalah konferensi Khilafah dan Peradaban. Beberapa tokoh intelektual ikut memberikan testimoni terkait isu demokrasi dan ekonomi liberal.<sup>4</sup>

Tablig akbar lebih sering merupakan mesin politik yang digunakan HTI untuk menggalang dukungan massa. Peserta yang hadir biasanya berjumlah ratusan hingga ribuan dan karenanya, tempat yang digunakan adalah lapangan, gedung olahraga/stadion. Tema yang diangkat biasanya merupakan gagasan utama HTI, terutama yang terkait dengan pentingnya negara Islam dan persatuan muslim. Tablig akbar juga terkadang memanfaatkan *public figure* sebagai cara menarik massa yang lebih besar.

---

4 Beberapa kegiatan besar yang pernah dilakukan HTI di Sulawesi Selatan dalam dua tahun terakhir adalah, 1) Temu Tokoh Peduli Syariah dan Khilafah. Dalam kegiatan ini menghimpun semua tokoh-tokoh Islam, mulai dari Ulama, Akademisi, Aktivistis kampus, dan tokoh-tokoh umat Islam lainnya, 2) Halaqah Intelektual Muslim. Kegiatan ini rutin tiap tahun diselenggarakan dengan tema kontemporer. Kegiatan ini melibatkan akademisi, Ulama dan aktivis kampus, 3) Kongres Mahasiswa Muslim Sulawesi. Kegiatan ini melibatkan semua unsur kampus se-Sulawesi, 4) Konferensi Islam dan Peradaban se-Sulawesi. Kegiatan ini termasuk sangat besar sehingga biasanya diselenggarakan di stadion, 5) Indonesia Congress of Muslim Students 2014. Ini adalah kegiatan bergengsi karena kegiatan ini mengundang pembicara bukan hanya dalam Negeri tapi juga di luar Negeri. Banyak pelajar dan mahasiswa turut serta dalam perhelatan ini. Ke lima kegiatan ini selalu melibatkan bukan hanya dari kader HTI sendiri tetapi juga di luar kader HT. Semua tokoh yang terlibat biasanya dimintai semacam testimoni terkait kegiatan tersebut. Testimoni para tokoh di luar HTI ini seakan-akan meneguhkan eksistensi HTI sebagai organisasi yang terbuka.

Dalam melakukan *al-sira'al-fikri* dalam bentuk *uslub*, artikel dan beberapa kajian-kajian HTI secara umum memiliki arah yang jelas, yaitu menentang ide-ide yang salah, akidah yang rusak, atau pemahaman yang keliru di tengah-tengah masyarakat. Setelah melakukan analisis terhadap beberapa aksi-aksi HTI, maka dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada enam tema utama yang mendapat sorotan, yaitu; khilafah, syariat Islam, demokrasi, kepemimpinan, dan partai politik (Syamsul Arifin 2010: 154).

Sebenarnya dalam fase ini (proses menerima *fikrah*), adalah kondisi yang sangat penting demi keberhasilan usaha mobilisasi dalam bentuk *framing* (pembingkai). Ini adalah suatu proses di mana aktor gerakan sosial menciptakan dan menggelindingkan wacana yang dapat bergema di antara mereka yang menjadi sasaran mobilisasi. Inti prosesnya adalah penafsiran keluhan-keluhan berdasarkan bingkai utama (*master frame*) tertentu dan menimbulkan harapan tersendiri. *Framing* dapat dirumuskan sebagai seni mengkomunikasikan pesan untuk membujuk massa dan meraih dukungan dan partisipasi (Noorhaidi Hasan 2012: 135).

Dalam tahapan ini sebenarnya *framing* dapat membuktikan bahwa di saat Indonesia berada dalam keadaan krisis kepercayaan dan moral serta krisis lainnya, HTI tampil memberikan solusi keumatan dan pencerahan agar umat Islam terus mengkritisi negara. Jangan menjadi rakyat yang apatis dan tidak mau mencampuri urusan politik negara. Perjuangan HTI di Sulawesi Selatan sendiri juga telah menjadikan kampus-kampus sebagai ajang kaderisasi untuk melahirkan kader-kader yang cerdas dan kritis. Dengan banyaknya aktivitas HTI ini sehingga HTI di Sulawesi Selatan dianggap menjadi penyangga utama Hizbut Tahrid di Indonesia Timur secara umum (Dirwan, 2015).

**Kedua** tahapan *tafa'ul ma'a al-ummah*. Tahapan kedua ini merupakan tahapan yang amat menentukan karena HT diadaptasikan secara langsung dengan masyarakat. Pada tahapan ini HT secara terbuka mulai berinteraksi dengan masyarakat untuk

melakukan sosialisasi gagasan politiknya dan mencari dukungan dari masyarakat. Aktifnya para aktivis di kampus-kampus maupun di sekolah-sekolah adalah bagian dari tahapan ini.

Tahapan yang **ketiga** adalah adalah *istilam al-hukm* (mengambil alih kekuasaan). Tahap *Istilamu al-Hukmi* (penerimaan/pengambilalihan kekuasaan), untuk menerapkan Islam secara nyata, mudah dan menyeluruh, sekaligus menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh dunia.

Di Sulawesi Selatan, gerakan sosial HT masih jauh dari tahapan *istilam al-hukm*. Gerakan sosial HT masih tertumpu pada tahapan *tathqif* dan mulai bergerak pada tahapan *tafa'ul ma'a al-ummah*. Jika dilihat dari teori gerakan sosial, *istilam al-hukm* bisa dikategorikan sebagai gerakan sosial revolutif, yaitu suatu gerakan sosial yang bertujuan mengubah seluruh tatanan sosial. Melalui *istilam al-hukm*, HT ingin mengubah sistem politik sekuler dan *kufur* dengan sistem politik Islam yang disebut dengan *daulah khilafah Islam*. Dengan mengambil contoh Indonesia yang dijadikan *majal al-dakwah* (wilayah dakwah) oleh HT untuk diproyeksikan sebagai embrio *daulah khilafah Islam*, belum ada satupun gerakan keagamaan revolutif yang berhasil mengubah sistem politik dengan sistem politik Islam. Bahkan Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang pernah ada di Sulawesi Selatan tidak berhasil mengembangkan misinya yang dimotori oleh Kahar Muzakkar. Persoalannya akan menjadi lain bila Hizbut Tahrir Indonesia mengubah posisinya untuk melebur dan membaaur dengan partai-partai politik Islam yang memiliki visi dan misi yang sama untuk membangun negara khilafah. Akan tetapi dari awal Hizb Tahrir menyatakan dirinya sebagai organisasi yang tidak akan menjadi partai politik. Hizb Tahrir tetap menjadi organisasi ekstra-parlemen yang setiap saat mengimbangi dan mengkritik pemerintah (Dirwan, 2015).

Dalam konteks sekarang ini, Tony Fitzpatrick menggambarkan bahwa kehidupan politik kini merujuk pada dua proses yang bertentangan tetapi saling memperkuat, yakni proses yang

mengarah ke pusat (*centripetal process*) dan proses yang mengarah ke pinggir (*centrifugal process*). Dalam konteks oposisi, Fitzpatrick melihat proses pertama sebagai oposisi yang mengarah pada kekuasaan pemerintah dalam hubungannya dengan tuntutan dan kepentingan rakyat banyak. Sedangkan proses yang kedua merupakan oposisi politik baru yang lebih dicirikan oleh kecenderungan para individu untuk melakukan mobilisasi di seputar isu tunggal, dibandingkan oleh penggabungan diri dan partisipasi dalam partai politik. Menurut Fitzpatrick, oposisi parlementer memaknai politik sebagai perjuangan untuk mengontrol para anggota dewan. Sementara, gerakan ekstra-parlementer memaknai politik sebagai estetika, yakni kultur tandingan. Adapun yang pertama masih setia dengan istilah krisis dan kebangkrutan negara, sementara yang kedua lebih banyak memperkuat ragam pandangan dari kelompok kiri dan kanan (*right-left spectrum*) (Kurniawan, 2005).

Sebagaimana gambaran Tony Fitzpatrick tentang oposisi ekstra-parlementer di atas, maka HTI bisa dikategorikan sebagai gerakan ekstra-parlemen karena aktivitas politiknya mengarah ke masyarakat (*centrifugal process*), berkisar pada isu tunggal, dan memaknai politik sebagai kultur tandingan. Aktivitas politik dalam suatu sistem sosial mengeksperisikan keyakinan terhadap legitimasi struktur kekuasaan dan otoriti dalam sistem sosial yang ada. Sedangkan aktifitas politik non rutin mengespresikan keyakinan bahwa ada sesuatu yang salah dalam struktur politik dan kondisi sosial ekonomi yang ada, dan atau dalam kebijakan, dan atau dalam diri para pejabat dan perilaku mereka. Aktivitas ini bertujuan melakukan perubahan dengan mengecilkan arti penting aktivitas politik rutin karena dianggap tidak banyak mendatangkan perubahan politik dan sosio-ekonomi yang signifikan. Hal tersebut kadang-kadang dianggap sebagai ekspresi dari protes sosial, tapi tidak jarang juga dianggap sebagai kriminalitas atau pemberontakan, bergantung pada bentuk reaksi yang diberikan masyarakat (Kurniawan, 2005).

## Gerakan Politik PKS-HTI: Antara Demokrasi dan Penegakan Syariah

Secara historis, HTI merupakan bagian dari tiga komponen Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang saling berebut pengaruh di masjid-masjid kampus: Jamaah Tarbiyah, Salafi, dan HTI sendiri. Kalau dilihat dari sejarahnya itulah bisa dikatakan bahwa kemunculan HTI di Sulawesi Selatan tidak dapat dipisahkan dari peranan jaringan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) pada tahun 1990-an. Dijelaskan juga sebelumnya bahwa aktivis LDK UMI-lah yang berperan penting dalam membawa ide-ide HTI dan mengembangkannya di Makassar. Bahkan Humas HTI di Sulawesi Selatan dan Barat (Sul-Sel-Bar) saat ini adalah mantan aktivis Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Dari penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa sebenarnya PKS dan HTI mempunyai kesamaan asal-usul dan jaringan sebagai modal *resource mobilization* (pembangunan sumber daya) dalam kerangka membantu gerakan-gerakan kolektifnya (*collective action frame*). Hal ini juga memberikan fakta bahwa hubungan PKS-HTI terlihat secara nyata bagaimana tahapan (politik) baik PKS maupun HTI dalam mencapai cita-citanya.<sup>5</sup> Tabel berikut bisa menjelaskan tahapan tersebut.

---

5 Seperti diketahui bahwa Ikhwan al-Muslimun mengilhami organisasi-organisasi dan gerakan militan Islamis diberbagai kawasan dunia. Hizb Tahrir, misalnya didirikan oleh Taqiy al-din an-nabhani pada 1953 dengan mengambil beberapa inspirasi dari Ikhwan al-Muslimin. Di tanah kelahirannya, Palestina, kawasan yang sudah lebih dari setengah abad terilit konflik berdarah dengan Israel, Hizb Tahrir berkembang dengan tujuan utama menghimpun kekuatan Muslim menghadapi imperialisme dan kolonialisme Barat yang dipercaya berdiri kokoh di belakang Israel dalam menancapkan kekuasaannya. Sebelum mendirikan Hizb Tahrir, Taqiy al-Din an-Nabhani memang telah aktif di dalam Ikhwan al-muslimun. An-Nabhani mengagumi visi hasan al-Banna yang berupaya keras membangunkan kesadaran umat Islam untuk bergerak membebaskan diri dari cengkraman imperialisme dan klonialisme Barat. Sejalan dengan namanya "hizb tahrir" berarti "partai pembebasan" (Noorhaidi Hasan, 2012:38-39).

Tabel 5.

**Tahapan Gerakan Politik PKS dan HTI**

<b>PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</b>	<b>HIZBU TAHRIR INDONESIA</b>
1. Mihwar Tanzhimi (pembinaan kader)	1. Tahap Tatsqif (pembinaan/pengkaderan)
2. Mihwar Sya'bi (orbit masyarakat)	2. Tahap Tafa'ul (Interaksi masyarakat)
3. Mihwar Muasasi (orbit kelembagaan)	3. Tahap Istilamul Hukmi (Pengambil alihan kekuasaan)
4. Mihwar Daulah (orbit negara/kekuasaan)	
<b>Negara Islam/Penerapan Syariah</b>	<b>Negara Islam/Penerapan Syariah</b>

Tabel 5. di atas jelas menggambarkan bahwa kedua gerakan Islam tersebut, meskipun wilayah politiknya berbeda, akan tetapi tujuan utamanya sama yaitu negara Islam/khilafah dan penegakan syariah. Hal ini juga dipertegas oleh ketua DPW PKS Sulawesi Selatan Andi Akmal Pasluddin (2014), bahwa meskipun PKS tidak secara nyata memperjuangkan negara Islam dan Syariah Islam, akan tetapi kami mendukung perjuangan HTI, dan PKS juga akan mengarah ke sana meskipun tidak sekarang ini.

Penjelasan di atas semakin menegaskan bahwa PKS dan HTI turut bermain dalam kerangka perjuangan negara dan syariah Islam sesuai dengan ideologi masing-masing. Dalam kerangka ini, peran kedua organisasi Islamis ini bisa dikatakan sebagai bentuk konsolidasi sosial dalam melakukan aktivismenya. Di saat Indonesia dilanda krisis moral dan kepercayaan, PKS-HTI datang memberikan solusi di tengah krisis dan menawarkan ide-ide supaya masyarakat tetap berperan dalam menjaga keutuhan negara di tengah transisi menuju demokrasi. Bentuk-bentuk konsolidasi sosial dan ide-ide yang ditawarkan tersebut terwujud dalam tahapan gerakan mereka masing-masing.

Harus di akui bahwa gerakan syariah adalah bagian dari aktivisme Islam yang tersebar di berbagai lembaga, baik di partai

politik maupun di ekstra-parlemen. Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, wacana syariah setidaknya mampu menjadi ikatan moralitas bersama, terutama di daerah berpenduduk mayoritas Muslim. Di saat kondisi krisis multi dimensi yang melanda Indonesia, masyarakat menginginkan sistem nilai yang menjadi pegangan bersama. Krisis sering kali menimbulkan anomie di mana sistem lama tak berlaku lagi, atau terdelegitimasi, sementara sistem baru pengganti belum ada (Hakimul Ikhwan, 2011). Pertumbuhan pesat aturan syariah di beberapa daerah terjadi dalam masa transisi demokrasi di Indonesia saat ini. Dalam konteks inilah inisiasi syariah sangat berjasa menghindarkan masyarakat dari resiko *chaos* yang lebih besar akibat ketiadaan basis nilai (moralitas) bersama dalam masyarakat.

Pada tingkat lokal gerakan syariah juga telah jadi momentum konsolidasi sosial sekaligus konsolidasi demokrasi. Diskursus syariah telah menarik kelompok Islam ideologis untuk masuk ke episentrum dinamika demokrasi lokal. Mereka sebelumnya tereksklusi (*excluded*) dari aktivisme politik. Mereka adalah eks-Masyumi dan *Darul Islam* serta pengusung ideologi syariah. Selama empat dekade (1950-1990-an) mereka mengalami represivitas militer dan stigmatisasi rezim. Selama periode tersebut mereka terpaksa atau dipaksa apolitik. Padahal, untuk membangun demokrasi substantif diperlukan partisipasi aktif semua elemen masyarakat. Dalam konteks inilah wacana syariah jadi magnet sekaligus ruang partisipasi politik kelompok Islam ideologis. Perkembangan ini tentu saja sangat bermakna bagi peningkatan kualitas demokrasi Indonesia (Hakimul Ikhwan, 2011).

Keadaan seperti ini telah terbangun ruang konsolidasi gerakan yang tetap terjaga. Partisipasi substantif dalam proses kebijakan juga secara konsisten tetap dilakukan. Jika sebelum deklarasi gerakan syariah mereka cenderung menarik diri dari aktivisme politik, kini mereka aktif memengaruhi proses kebijakan. Mereka tidak masuk struktur kekuasaan politik, tetapi memiliki medium penyaluran aspirasi politik yang efektif dalam nalar demokrasi lokal.



Kalau dianalisis secara mendalam, kondisi di atas dipengaruhi setidaknya dua hal. *Pertama*, internalisasi nilai syariah yang damai dan merahmati semua pihak. *Kedua*, mekanisme demokratis dipercaya membuka ruang kemungkinan mewujudkan cita-cita perjuangan. Dengan demikian, gerakan syariah di banyak daerah telah berkontribusi membangun dan memperkuat demokrasi. Relasi keduanya tidak terjadi dalam pertarungan saling menegasi. Sebaliknya, perlu dipahami dalam bingkai saling mengisi dalam membangun sistem demokrasi (Hakimul Ikhwan, 2011). Dari logika berpikir tersebut, maka tidak salah kalau keberadaan PKS-HTI dengan aktivismenya, telah berkontribusi dalam membangun demokrasi khususnya pada tingkat lokal.

Selanjutnya, dalam konteks politik lokal di Sulawesi Selatan, implikasi dari gerakan syariah telah membentuk organisasi yang lebih besar lagi. Komite Penegakan dan Penerapan Syariat Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan adalah salah satu efek dari gerakan PKS dan HTI Sulawesi Selatan. Beberapa data yang mendukung terbentuknya organisasi ini (KPPSI) adalah hampir semua pendirinya adalah eks-Masyumi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah bahwa para pendiri dan beberapa kader utama PKS adalah eks-Masyumi. Beberapa anggota KPPSI di beberapa kota di Sulawesi Selatan juga adalah mayoritas kader-kader PKS juga.

Implikasi aktivitas HTI juga secara tidak langsung berpengaruh dalam pembentukan KPPSI ini. Salah satu buktinya adalah beberapa kader-kader HTI khususnya di beberapa kota turut serta dalam kepengurusan KPPSI. Dukungan atas gerakan penegakan syariah oleh KPPSI sangat nyata oleh HTI. Selain KPPSI, organisasi selanjutnya yang terbentuk adalah Wahdah Islamiyah.<sup>6</sup> Bentuk dukungan PKS dan HTI dalam organisasi ini juga sangat nyata. Bahkan dalam muktamar Wahdah Islamiyah di Makassar tanggal 15 Desember 2013, presiden PKS

6 KPPSI dan Wahdah Islamiyah adalah organisasi yang murni lahir di Sulawesi Selatan. Kedua organisasi ini sama-sama lahir pasca reformasi dan perjuangan mereka adalah menegakkan syariat Islam di Sulawesi Selatan.

Anis Matta turut serta dalam acara tersebut. Kehadiran Wahdah Islamiyah di Sulawesi Selatan tidak bisa diingkari bahwa di dalamnya adalah mayoritas kader-kader PKS (Imam Rohani, 2014). Kedua organisasi ini (KPPSI dan Wahdah Islamiyah) adalah bentuk nyata bahwa di Sulawesi Selatan sangat serius menegakkan syariat Islam. Lewat kedua organisasi inilah PKS dan HTI sengaja menanamkan ide-ide Islamis mereka. Inilah yang kemudian peneliti sebut terbentuknya *imagined solidarity* (solidaritas bayangan), yaitu terbentuknya sebuah solidaritas bersama dalam memperjuangkan syariah Islam. Analisis akhir ini sekaligus menjadi bahan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

Melihat kecenderungan konstruksi gerakan politik PKS-HTI di atas, seperti terbentuknya ruang solidaritas bersama, gerakan syariah dan ruang konsolidasi demokrasi, di sini semakin mempertegas adanya pergeseran dari identitas Islamisme yang melekat terhadap PKS-HTI bergeser ke post-Islamisme. Menurut Asep Bayat (2011: 155) bahwa ide-ide post-Islamisme bergerak melalui teologi, hukum, lembaga ulama, dan peleburan antara agama dan negara. Sebagaimana dalam reformasi, pergolakan bisa datang, baik dari dalam maupun dari luar kemapanan agama.

## Kesimpulan

Dilihat dari strategi dakwah, jihad, dan perjuangan, PKS dan Hizbut Tahrir Indonesia memang rapi dan sistematis, di mana dalam gerakannya melalui aksi dan pemikiran politik dengan membangun opini publik kepada lapisan masyarakat melalui tulisan dan gerakan. Strategi tersebut secara kasat mata tidak berpengaruh terhadap perubahan ideologi negara, tetapi secara radikal konseptual merupakan bagian strategi mengubah ideologi negara. Dalam realitas politik keagamaan, tentunya pemikiran politik Hizbut Tahrir Indonesia mendapat tantangan berat dari kalangan umat Islam sendiri, karena tidak semua organisasi Islam mau menerima gagasan penegakkan khilafah *Islamiyyah* di

Indonesia. Logikanya HTI tidak akan pernah bertahan dengan eksistensinya saat sekarang ini kalau mereka tidak melakukan “negosiasi” dengan Negara.

Setidaknya bahwa Islamisme di Sulawesi Selatan dengan pola pergerakannya cenderung ke arah post-Islamisme, yakni sebuah gerakan yang lebih modern. Artinya, bahwa kebanyakan gerakan-gerakan yang ada lebih cenderung akomodatif dengan penguasa atau pemerintah. Arah pos-Islamisme adalah sebuah bentuk implikasi politik yang nyata di Sulawesi Selatan. Kecenderungan pergeseran wajah dari Islamisme ke post-Islamisme ini kurang lebih dipengaruhi oleh tiga sumber pengaruh dan tantangan utama, yakni, pengaruh sistem politik yang ada di Indonesia, munculnya kaum sekuler kritis dan faktor geo-politik. Hal ini terlihat dengan adanya PKS dan HTI sudah melakukan proses adaptasi dengan sistem politik yang ada.

Pada sisi yang lain, bahwa aktivisme Islam oleh PKS-HTI telah mewujudkan sebuah *imagined solidarity* (solidaritas bayangan) antar aktivis atau para pejuang syaria’ah di Sulawesi Selatan seperti KPPSI dan Wahdah Islamiyah. Maksudnya adalah terbentuknya rasa kebersamaan dalam memperjuangkan ide-ide syariah sekaligus sebagai simbol keislaman. Dengan identitas keislaman yang kental, maka sangat wajar ketika simbol keislaman tersebut sangat terkait dengan identitas politik mereka. Ekspresi politik Islam dan Islam politik di Sulawesi Selatan mempunyai identitas tersendiri.

## Daftar Rujukan

- Arifin, Syamsul. 2010. *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial kaum Fundamentalis; Pengalaman Hizbu al-tahrir Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Bayat, Asep. 2012. *Pos-Islamisme*. Terj. Yogyakarta: LKiS.
- Hasan, Noorhaidi. 2012. *Islam Politik dan Dunia Kontemporer; Konsep, Genealogi, dan Teori*. Yogyakarta: SUKA-Press.

- Hilmy, Masdar. 2009. *Teologi Perlawanan: Islamisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia Pasca Orde-Baru*. Yogyakarta: Kanisius.
- Linrung, Tamsil. 2013. *Politik untuk Kemanusiaan; Mainstream Baru Gerakan Politik Indonesia*. Tkp: Tali Foundation.
- Muhtadi, Burhanuddin. 2012. *Dilema PKS; Suara dan Syariah*. Jakarta: Gramedia.
- Mujani, Saiful. 2007. *Muslim Demokrat; Islam Budaya Demokrasi, dan Partaisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Gramedia.
- Nashir, Haedar. 2007. *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Jakarta: RMBOOKS.
- Rizal, Samsu. 2001. "Jaringan Hizbu Tahrir Indonesia di Kota Makassar, Sulawesi Selatan" dalam Syafii Ma'raf (ed.), *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Takariawan, Cahyadi. 2009. *Menyongsong Mihwar Daulah; Mempersiapkan Kader-Kader Dakwah Menjadi Pemimpin Negara*. Solo: Intermedia.

**Jurnal:**

- Abdullah, Kurniawan. *Fenomena Gerakan Politik Islam Ekstra perlementer: Hizbu tahrir Indonesia*, DIALOG: Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan. Edisi, Tahun Ke-3, 2005.
- Baehr, Peter. *Marxism and Islamism: Intellectual Conformity In Aron's time and Our Own*, Journal Of Classical Sociology (2011) 11: 173
- Ghalioun, Burhan (2010), *Islamology Comes to Aid of Islamism*, DIOGENES, (2010) 226:120-126
- Kundnani, Arun. *Islamism and the Roots Of Liberal Rage*, Race Class 2008, Vol. 50(2).

***Koran dan Majalah***

Ikhwan, Hakimul, Gerakan Syariah dan Demokrasi, *KOMPAS*,  
*26 Desember 2011*

***Wawancara***

Andi Akmal Pasluddin, Anggota DPR-RI utusan PKS Provinsi  
Sulawesi Selatan

Didi, Syabab HTI *chapter* UIN Alauddin Makassar

Dirwan Abdul Jalil, HUMAS HTI wilayah Sulawesi Selatan dan  
Barat

Imam Rohani, Sekretaris PKS Provinsi Sulawesi Selatan

Sri Rahmi, Anggota DPRD Propvinsi Sulawesi Selatan dari  
PKS

Zainuddin Losi, Syabab HTI Sulawesi Selatan